

PENJUALAN ANGSURAN

Nur Anita Chandra Putry¹, Uum Helmina Chaerunisak², Hasna Febdina Sari³, Aulia Aprinur Pratiwi⁴, Kirana Andriane⁵

chandraputry@ustjogja.ac.id¹, helmina.uum@ustjogja.ac.id², hasnafebdina@gmail.com³,
auliaaprinur@gmail.com⁴, kiranaandriane@gmail.com⁵

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

ABSTRAK

Penjualan angsuran merupakan metode transaksi di mana pembayaran dilakukan secara bertahap dalam periode waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Skema ini memberikan aksesibilitas bagi konsumen untuk memperoleh barang tanpa pembayaran tunai sekaligus, namun juga menimbulkan konsekuensi risiko seperti keterlambatan pembayaran, wanprestasi, hingga potensi sengketa akibat klausul perjanjian yang tidak jelas. Kajian ini bertujuan menjelaskan konsep penjualan angsuran, karakteristik transaksi, serta pentingnya perjanjian yang memuat asas kejelasan, keseimbangan, dan itikad baik sebagai dasar hubungan hukum para pihak. Metode penulisan menggunakan pendekatan deskriptif normatif dengan menelaah prinsip perjanjian dalam praktik jual beli angsuran. Hasil kajian menegaskan bahwa keberadaan perjanjian tertulis yang transparan, mekanisme pembayaran yang terstruktur, serta pengaturan hak dan kewajiban yang jelas menjadi elemen utama untuk menjaga kepastian dan meminimalkan potensi konflik dalam transaksi penjualan angsuran.

Kata kunci: Penjualan Angsuran, Cicilan, Perjanjian, Wanprestasi, Transaksi Bertahap.

ABSTRACT

Installment sales refer to a transaction method in which payments are made gradually over a mutually agreed period between the seller and the buyer. This scheme increases consumer accessibility to purchase goods without requiring full upfront payment, yet it carries potential risks such as late payment, default, and disputes arising from unclear agreement clauses. This paper aims to describe the concept and characteristics of installment sales and highlight the importance of agreements that uphold the principles of clarity, balance, and good faith as the foundation of the legal relationship between parties. The writing method uses a descriptive normative approach by examining contractual principles commonly applied in installment transactions. The findings emphasize that transparent written agreements, structured payment mechanisms, and clearly defined rights and obligations are essential elements to ensure legal certainty and minimize conflicts in installment sales transactions.

Keywords: *Installment Sales, Periodic Payment, Agreement, Default, Gradual Transaction.*

PENDAHULUAN

Penjualan angsuran (installment sales) adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, di masa yang akan datang. Transaksi ini diterapkan perusahaan dengan tujuan meningkatkan volume penjualan yang pada akhirnya juga diharapkan meningkatkan laba perusahaan. Karena pembayarannya diterima dalam beberapa periode setelah penyerahan barang, penjualan angsuran memiliki risiko besar dalam penagihan piutang. Risiko inilah yang menimbulkan berbagai masalah, yang secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua kelompok utama, yaitu masalah akuntansi dan masalah non-akuntansi. Walaupun perusahaan harus mengelola keduanya, isu yang paling krusial dalam pelaporan keuangan berada pada aspek akuntansi karena berkaitan langsung dengan kapan laba diakui, bagaimana piutang dicatat, bagaimana beban dicadangkan, dan bagaimana transaksi disajikan secara andal di laporan keuangan.

Dari sudut pandang akuntansi, penjualan angsuran bukan hanya soal penyerahan barang dan penerimaan kas bertahap, tetapi juga mengenai ketepatan pengakuan laba kotor

yang menjadi indikator performa finansial perusahaan. Dalam prinsip akuntansi, pendapatan hanya dapat diakui ketika dua kriteria telah terpenuhi: earning process telah selesai dan pertukaran telah terjadi. Pada penjualan angsuran, pertukaran barang memang terjadi di awal, namun realisasi kas belum sepenuhnya selesai. Kondisi ini memunculkan tantangan pencatatan karena perusahaan harus menentukan basis pengakuan laba yang paling tepat antara basis penjualan (accrual basis) atau basis kas (cash basis), yang masing-masing memberi dampak berbeda terhadap kewajaran laporan keuangan (Usman & Akib, 2025).

Pengakuan laba kotor berbasis penjualan dilakukan pada periode saat penjualan terjadi, tanpa memperhatikan apakah pembayaran sudah diterima atau belum. Perlakuan ini sama seperti pengakuan laba kotor dalam penjualan kredit biasa. Basis ini hanya layak digunakan jika memenuhi tiga syarat: jangka waktu pembayaran relatif pendek, biaya penagihan dan biaya lain dapat ditaksir secara teliti, serta kemungkinan pembatalan sangat kecil. Dalam kondisi tersebut, perusahaan tetap harus mencadangkan biaya penagihan dan beban lain yang berhubungan dengan penjualan agar laporan laba-rugi mencerminkan proper matching revenue with expenses. Cadangan kerugian piutang juga dicatat menggunakan metode penyisihan (allowance method), sebagaimana pencatatan piutang tak tertagih pada penjualan kredit.

Namun, jika syarat di atas tidak terpenuhi, basis penjualan berpotensi menimbulkan pengakuan laba yang terlalu cepat (premature recognition) dan piutang yang dinilai terlalu tinggi (overstated receivables), sehingga menurunkan kualitas laporan keuangan dan berisiko menyesatkan pengambilan keputusan. Sebaliknya, basis kas menunda pengakuan laba kotor sampai pembayaran benar-benar diterima. Pada basis ini, penerimaan kas dari penjualan angsuran baik uang muka maupun angsuran dianggap memiliki dua unsur: pembayaran atas harga pokok penjualan dan pembayaran atas laba kotor. Dalam penerapannya, terdapat tiga metode perlakuan penerimaan kas, yaitu: (1) harga pokok kemudian laba kotor (cost recovery method), (2) laba kotor kemudian harga pokok, atau (3) harga pokok dan laba kotor diakui secara proporsional sesuai pola angsuran yang disebut metode penjualan angsuran (installment method). Metode cost recovery menjadi pendekatan paling konservatif karena laba baru diakui setelah seluruh harga pokok tertutup, tetapi kelemahannya adalah tidak mencerminkan matching pendapatan-beban secara wajar dan dianggap terlalu menunda pengakuan kinerja perusahaan (Asrie, 2025).

Selain persoalan pengakuan laba, perusahaan juga harus menekan risiko gagal bayar melalui langkah administratif seperti pemberian angsuran secara selektif kepada pembeli yang kemampuan dan kejujurannya dapat dipercaya, melibatkan persetujuan atasan, atau menerapkan pemotongan gaji langsung. Walaupun langkah tersebut tergolong masalah non-akuntansi, hasilnya berpengaruh langsung terhadap kualitas piutang yang diakui di neraca, besaran penyisihan kerugian, dan kepastian realisasi laba kotor. Dengan kata lain, semakin rendah risiko pembatalan dan gagal bayar, semakin kuat dasar perusahaan dalam memilih metode pengakuan laba yang mencerminkan kondisi ekonomi transaksi secara nyata.

Bagi pengguna laporan keuangan, terutama manajemen, investor, kreditur, dan regulator, informasi laba yang berasal dari penjualan angsuran harus mampu menunjukkan bahwa laba tersebut benar-benar terealisasi secara ekonomi, bukan hanya diakui secara administratif. Oleh karena itu, keputusan akuntansi dalam penjualan angsuran memerlukan pertimbangan prudence (kehati-hatian), keandalan estimasi beban, dan kepastian penagihan piutang. Kesalahan dalam menentukan basis pengakuan laba dapat menyebabkan laporan laba-rugi tidak relevan dan neraca tidak mencerminkan kondisi aset perusahaan secara wajar.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penulisan pendahuluan ini adalah menjelaskan dan menegaskan pentingnya pemahaman akuntansi pada penjualan angsuran, khususnya

mengenai kriteria pengakuan pendapatan, alternatif basis pengakuan laba kotor, perlakuan piutang, pencadangan beban terkait, serta implikasinya terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan. Pembahasan ini juga bertujuan akademik, yaitu memberikan pemahaman mendalam mengenai perlakuan akuntansi penjualan angsuran agar dapat diterapkan secara tepat dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan sesuai prinsip dan standar akuntansi yang berlaku (Azzahrah et al, 2025).

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan fokus pada analisis perlakuan akuntansi penjualan angsuran. Penelitian dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi sumber ilmiah yang membahas konsep, standar, dan praktik pengakuan laba kotor, pencatatan piutang, serta penyisihan beban yang timbul dari transaksi angsuran. Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan menelaah buku akuntansi keuangan, jurnal nasional, publikasi akademik, serta standar akuntansi yang relevan dengan skema penjualan bertahap. Sumber yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi substansi akuntansi transaksi angsuran, terutama yang berkaitan dengan basis pengakuan laba (*accrual basis* dan *cash basis*), metode penyisihan piutang, dan mekanisme pencadangan beban penagihan. Untuk menjaga keteraturan telaah, data yang diperoleh dicatat dalam bentuk matriks literatur yang memuat konsep inti, karakteristik metode pengakuan laba, syarat penerapan, serta implikasinya terhadap penyajian laporan keuangan.

Validasi data dilakukan melalui triangulasi teori antar sumber, dengan membandingkan konsistensi konsep dan kesesuaian argumentasi ilmiah yang digunakan dalam literatur. Analisis data bersifat deskriptif-komparatif, dengan menafsirkan kesesuaian metode pengakuan laba kotor penjualan angsuran berdasarkan kriteria realisasi pendapatan, *matching principle*, dan tingkat kehati-hatian pelaporan laba. Penelitian juga menelaah dampak mekanisme pengendalian risiko gagal bayar dari sudut administratif-ekonomi yang memengaruhi kualitas pencatatan piutang di neraca. Hasil analisis diarahkan untuk membangun pemahaman konseptual yang kuat mengenai pemilihan basis dan metode akuntansi yang paling tepat dalam penjualan angsuran, sehingga mampu mendukung penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, serta mencerminkan substansi ekonomi transaksi sesuai rujukan literatur akuntansi keuangan (Firmansyah & Tama, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian berbasis studi literatur menunjukkan bahwa penjualan angsuran memiliki konsekuensi akuntansi yang lebih kompleks dibanding skema kredit biasa karena melibatkan ketidakpastian arus kas dan risiko penagihan jangka panjang. Dalam literatur akuntansi keuangan, fokus utama pencatatan berada pada pemilihan basis pengakuan laba kotor dan perlakuan atas penerimaan kas angsuran. Dua basis yang paling sering dibahas adalah basis penjualan (*accrual/sales basis*) dan basis kas (*cash basis*). Basis penjualan mengakui laba kotor pada periode transaksi terjadi, sementara basis kas menunda pengakuan laba hingga kas benar-benar diterima. Pemilihan basis ini memengaruhi struktur laporan laba-rugi dan neraca, khususnya dalam pengakuan piutang dan beban penyisihan. Literatur menekankan bahwa jika perusahaan memilih basis penjualan, maka pencadangan beban penagihan dan kerugian piutang wajib dibentuk menggunakan metode penyisihan (*allowance method*) agar prinsip *matching* tetap terjaga dan laba tidak disajikan secara overstated.

Pada basis kas, terdapat tiga metode utama perlakuan penerimaan kas, yaitu *cost recovery method*, metode pengakuan laba di awal, dan *installment method proportional*. Metode *cost recovery* dianggap paling konservatif karena laba hanya diakui setelah seluruh

harga pokok penjualan tertutup oleh kas yang diterima. Kelemahannya adalah menunda pengakuan laba secara ekstrem sehingga kurang mencerminkan pencocokan beban-pendapatan. Sementara itu, installment method proporsional dinilai lebih relevan karena mengakui unsur harga pokok dan laba kotor secara seimbang mengikuti pola angsuran, sehingga laba yang dilaporkan lebih mencerminkan substansi ekonomi transaksi.

Contoh numerik dalam literatur sering menggunakan ilustrasi serupa dengan transaksi PT ABC. Perusahaan melakukan penjualan angsuran dengan harga jual Rp12.500.000 dan harga pokok penjualan Rp10.000.000. Uang muka yang diterima sebesar Rp2.500.000, sedangkan sisanya Rp10.000.000 dibayar melalui empat kali angsuran tahunan di akhir periode. Laba kotor total transaksi adalah Rp2.500.000. Dalam cost recovery method, uang muka dan angsuran tahun pertama sampai ketiga belum menutup seluruh harga pokok, sehingga laba kotor belum diakui. Laba baru diakui pada saat total kas yang diterima melebihi harga pokok. Sementara pada installment method, setiap penerimaan kas langsung dipisahkan antara komponen harga pokok dan laba kotor berdasarkan rasio laba kotor terhadap harga jual ($\text{Rp}2.500.000 \div \text{Rp}12.500.000 = 20\%$). Dengan rasio 20% ini, setiap kas yang diterima mengandung 80% unsur pengembalian harga pokok dan 20% realisasi laba kotor.

Perhitungan pengakuan laba kotor menurut dua metode tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Pengakuan Kas Penjualan Angsuran

Tahun	Kas Diterima	Metode Cost Recovery: Pengakuan Laba	Installment Method 20%: Laba Diakui	Installment Method 20%: Harga Pokok Tertutup
1991 (Uang muka)	2.500.000	0	500.000	2.000.000
1991	2.500.000	0	500.000	2.000.000
1992	2.500.000	0	500.000	2.000.000
1993	2.500.000	0	500.000	2.000.000
1994	2.500.000	2.500.000	500.000	2.000.000
Total	12.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000

Pada tabel di atas, terlihat bahwa dalam metode cost recovery, laba baru diakui pada tahun 1994 ketika total kas yang diterima telah menutup seluruh harga pokok penjualan dan masih menyisakan kelebihan kas yang merepresentasikan laba. Total laba yang diakui adalah Rp2.500.000, sesuai laba kotor transaksi. Namun, seluruh laba seolah-olah dilaporkan hanya pada satu periode, padahal proses perolehan ekonominya terjadi sejak barang diserahkan di awal. Kondisi ini mengurangi relevansi informasi laba antarperiode. Di sisi lain, installment method mengakui laba Rp500.000 per tahun karena 20% dari setiap kas yang diterima merupakan realisasi laba. Total laba tetap Rp2.500.000, namun penyebarannya lebih stabil dan mencerminkan pola transaksi, sehingga literatur menilai metode ini lebih unggul dalam aspek representasi ekonomi.

Dalam pencatatan piutang, studi literatur juga menegaskan bahwa piutang pada penjualan angsuran diakui sebesar sisa tagihan yang belum diterima, yaitu Rp10.000.000 setelah uang muka. Di neraca, piutang ini tidak boleh disajikan tanpa mempertimbangkan kualitasnya. Perusahaan dianjurkan membentuk penyisihan kerugian piutang, misalnya 5–10% dari saldo piutang, tergantung profil risiko pembeli dan jangka waktu penagihan. Dalam jurnal akuntansi, pencatatan penyisihan dilakukan sebagai berikut:

(Dr) Beban Piutang Tak Tertagih

(Cr) Cadangan Kerugian Piutang

Metode ini mirip dengan perlakuan piutang kredit biasa, tetapi nominal penyisihan pada penjualan angsuran cenderung lebih tinggi karena waktu penagihan lebih panjang. Selain itu, literatur juga menyoroti pencadangan beban penagihan. Misalnya, jika beban penagihan ditaksir sebesar Rp300.000 per tahun, maka perusahaan yang memakai basis penjualan tetap mencatat beban ini di periode terjadinya dengan mekanisme cadangan:

(Dr) Beban Penagihan

(Cr) Cadangan Beban Penagihan

Pencadangan ini penting agar laba kotor yang sudah diakui di awal tidak berdiri sendiri tanpa dikompensasi beban yang relevan. Hasil penelitian literatur juga menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia banyak menggunakan skema penjualan angsuran pada sektor properti, otomotif, dan barang modal bernilai tinggi. Dalam praktiknya, pembeli dari segmen berpendapatan tetap seperti ASN atau pegawai BUMN dianggap memiliki kualitas piutang lebih baik, sehingga memungkinkan penggunaan installment method karena realisasi kasnya lebih dapat diprediksi. Jika pembeli berasal dari segmen umum dengan stabilitas pendapatan fluktuatif, literatur cenderung menganjurkan basis kas atau bahkan cost recovery method untuk menghindari risiko pengakuan laba yang tidak realistis.

Penelitian juga menegaskan bahwa tidak ada satu metode yang sepenuhnya ideal untuk semua perusahaan. Metode pengakuan laba harus mempertimbangkan tiga aspek utama: (1) substansi ekonomi transaksi, (2) kemampuan perusahaan mengestimasi beban dan risiko piutang, dan (3) dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Namun, installment method proporsional menjadi rekomendasi literatur yang paling sering muncul karena dianggap memberikan keseimbangan terbaik antara kehati-hatian dan relevansi pelaporan laba (Elmi & Hamidi, 2025).

Pembahasan

Implikasi Pemilihan Basis Pengakuan Laba terhadap Laporan Keuangan

Pemilihan basis pengakuan laba pada penjualan angsuran merupakan keputusan akuntansi yang menentukan bagaimana laba dan piutang direpresentasikan dalam laporan keuangan. Basis penjualan (accrual/sales basis) mengakui laba kotor saat transaksi terjadi, sedangkan basis kas (cash basis) menundanya sampai kas diterima. Secara konseptual, perbedaan ini bukan sekadar soal waktu pengakuan, melainkan juga tentang bagaimana aset dan kinerja perusahaan dipersepsikan oleh pengguna laporan. Literatur akuntansi menekankan bahwa pengakuan pendapatan harus memenuhi kriteria realisasi, yakni earning process selesai dan exchange terjadi. Pada penjualan angsuran, pertukaran barang memang terjadi di awal, namun arus kas belum sepenuhnya terealisasi, sehingga basis kas dipandang lebih aman ketika risiko gagal bayar sulit diestimasi.

Dalam kerangka pelaporan keuangan, basis penjualan dapat menciptakan laba yang terlihat tinggi di awal periode, meskipun kasnya belum masuk. Konsekuensinya, neraca perusahaan akan menampilkan saldo piutang yang besar sebagai aset lancar, sementara laba kotor akan langsung menaikkan ekuitas melalui laporan laba-rugi. Jika tidak diimbangi dengan penyisihan piutang dan pencadangan beban penagihan, laporan dapat kehilangan keandalan dan kehati-hatian. Pengguna eksternal khususnya investor dan kreditur bisa menganggap perusahaan lebih sehat dari kondisi sebenarnya karena laba belum benar-benar terealisasi secara kas. Oleh karena itu, standar praktik akuntansi menganjurkan bahwa perusahaan yang menggunakan basis penjualan wajib membentuk cadangan beban dan penyisihan piutang untuk menjaga prinsip matching dan menghindari overstatement aset maupun laba (Bohal, 2025).

Basis kas memberi efek sebaliknya, laba tampak kecil di awal dan meningkat di akhir periode angsuran, mengikuti realisasi kas. Neraca akan menyajikan piutang sebagai aset, namun laba kotor belum diakui sampai kas masuk. Basis ini memberikan perlindungan dari

penggelembungan laba, tetapi bisa menyebabkan laporan laba-rugi antarperiode terlihat tidak stabil jika metode pengakuan kasnya tidak proporsional. Pada metode cost recovery, misalnya, laba baru diakui setelah seluruh harga pokok tertutup. Jika angsuran berlangsung 4–10 tahun, laporan laba-rugi bisa menampilkan laba nol bertahun-tahun lalu melonjak di tahun tertentu. Meskipun secara prudence aman, model ini kurang informatif dalam menggambarkan kinerja ekonomi perusahaan di tiap periode.

Dalam praktik akuntansi keuangan, kualitas laporan tidak hanya dinilai dari benar-tidaknya angka, tetapi juga dari relevansi dan representasi ekonomi transaksi. Basis penjualan lebih relevan ketika piutang berkualitas tinggi, risiko kecil, dan beban bisa diestimasi teliti, karena laba mencerminkan kinerja operasional di periode terjadinya transaksi. Namun, jika piutang berasal dari segmen dengan stabilitas pendapatan fluktuatif, basis kas menjadi pilihan lebih logis. Walaupun pembahasan teori tidak dominan dalam bagian ini, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa basis kas dan basis penjualan sama-sama memiliki dampak struktural pada neraca, laba-rugi, arus kas, serta persepsi pengguna laporan, sehingga pemilihannya harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam mengukur dan mencadangkan risiko.

Pencatatan piutang pada penjualan angsuran menuntut pengukuran nilai bersih yang dapat direalisasi (NRV). Walaupun piutang diakui sebesar sisa tagihan, literatur menekankan bahwa penyisihan kerugian piutang tidak boleh diabaikan, karena semakin panjang periode penagihan, semakin besar potensi penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak disisihkan, neraca akan menampilkan aset yang tidak realistis dan dapat menurunkan kualitas keputusan manajerial maupun penilaian kesehatan perusahaan.

Secara ringkas, bagian ini menegaskan bahwa implikasi pemilihan basis pengakuan laba tidak hanya menyentuh laba kotor, tetapi juga cara piutang diukur, bagaimana beban dicadangkan, serta bagaimana laporan keuangan disajikan agar tidak bias dan tetap relevan, terutama dalam perspektif akuntansi finansial yang menilai substansi ekonomi lebih dari sekadar legalitas transaksi (Pradanti & Lestari, 2024).

Perlakuan Akuntansi atas Piutang, Uang Muka, dan Penyisihan Beban

Dalam penjualan angsuran, piutang diakui ketika barang diserahkan dan pembayaran belum diterima penuh. Uang mukayang diterima di awal bukan sekadar kas masuk, tetapi memiliki konsekuensi pencatatan berbeda tergantung basis pengakuan laba. Pada basis penjualan, uang muka diakui sebagai bagian dari transaksi penjualan, namun pada basis kas, uang muka harus dianalisis komponennya apakah ia menutup harga pokok atau mengandung laba kotor. Di sini, literatur hanya digunakan secukupnya untuk memperkuat konsep bahwa penerimaan kas angsuran harus dipisah antara pengembalian harga pokok dan realisasi laba.

Salah satu aspek paling penting adalah perlakuan piutang di neraca. Piutang angsuran tidak dapat disamakan begitu saja dengan piutang kredit jangka pendek, karena literatur akuntansi menekankan bahwa piutang harus diukur berdasarkan kualitas keterpulihan (collectibility). Semakin panjang jangka angsuran, semakin tinggi risiko penurunan nilai piutang. Oleh karena itu, pencatatan penyisihan kerugian piutang menjadi wajib ketika menggunakan basis penjualan. Jurnal yang digunakan:

(Dr) Beban Piutang Tak Tertagih

(Cr) Cadangan Kerugian Piutang

Metode ini digunakan untuk menjaga piutang tetap disajikan dalam nilai bersih yang lebih andal. Walaupun teori allowance method sudah mapan dalam akuntansi kredit, pada penjualan angsuran, penentuan nominal penyisihan cenderung lebih besar karena risiko penagihan yang lebih tinggi dan arus kas yang tertunda.

Selain piutang, beban penagihan dan beban lain yang berkaitan dengan penjualan angsuran juga harus dicadangkan jika basis penjualan digunakan. Cadangan ini penting karena dalam skema angsuran, beban penagihan bukan beban insidental, melainkan beban yang melekat pada transaksi dan harus diakui di periode yang sama dengan pengakuan pendapatan. Jurnal pencadangan beban penagihan:

(Dr) Beban Penagihan

(Cr) Cadangan Beban Penagihan

Pencadangan ini membuat laporan laba-rugi lebih mencerminkan pencocokan beban-pendapatan, sehingga laba yang diakui tidak berdiri sendiri tanpa memperhitungkan beban yang diperlukan untuk merealisasikannya. Literatur juga menyoroti perlakuan uang muka. Jika perusahaan memakai installment method proporsional pada basis kas, uang muka tetap dipisah sesuai rasio laba kotor terhadap harga jual. Misalnya, jika laba kotor 20%, maka uang muka 20% diakui sebagai laba, dan 80% menutup harga pokok. Tetapi, jika basis penjualan digunakan, uang muka langsung menjadi bagian dari transaksi penjualan dan masuk ke akun kas atau setara kas tanpa memengaruhi pengakuan laba karena laba sudah diakui saat penjualan terjadi (Saputri & Sari, 2025).

Selain penyisihan piutang dan cadangan beban, literatur juga menekankan bahwa penjualan angsuran memerlukan administrative control yang memengaruhi aging schedule piutang. Jika piutang berasal dari pembeli berpendapatan tetap, seperti ASN atau pegawai perusahaan besar, aging risk piutang relatif lebih rendah dan nominal penyisihan bisa disesuaikan lebih teliti. Tetapi jika berasal dari segmen dengan pendapatan tidak stabil, nominal penyisihan harus lebih konservatif.

Penjualan angsuran juga memunculkan kebutuhan penyajian laporan arus kas yang mencerminkan realisasi kas bertahap. Walaupun laba belum diakui penuh di basis kas, laporan arus kas tetap mencatat kas yang masuk dari aktivitas operasi, sehingga pengguna laporan dapat melihat likuiditas transaksi secara real-time meskipun pengakuan laba berbeda.

Perlakuan akuntansi atas piutang, uang muka, dan beban penyisihan pada penjualan angsuran bukan hanya mengikuti aturan waktu pengakuan, tetapi menuntut pengukuran kualitas piutang, pemisahan komponen kas, serta pencadangan beban penagihan agar laporan tetap andal, realistis, dan mencerminkan biaya yang melekat pada transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan angsuran tidak hanya memengaruhi akun kas dan piutang, tetapi juga kualitas pengukuran aset, beban, dan laba dalam laporan keuangan (Adella et al, 2025).

Kesesuaian Metode Cost Recovery vs Installment Method Proporsional

Dalam studi literatur, metode cost recovery dan installment method proporsional sering dibandingkan karena keduanya digunakan pada basis kas namun dengan filosofi pengakuan laba yang berbeda. Cost recovery method menunda pengakuan laba kotor sampai seluruh harga pokok penjualan tertutup oleh kas yang diterima. Metode ini dinilai sangat konservatif dan cocok untuk perusahaan yang menghadapi risiko gagal bayar tinggi, penagihan panjang, atau ketika beban penjualan sulit diestimasi secara teliti. Tetapi kelemahannya adalah tidak menggambarkan kinerja perusahaan antarperiode secara relevan, karena laba bisa tampak nol bertahun-tahun meskipun proses penyerahan barang dan aktivitas penjualan sudah terjadi di awal.

Sebaliknya, installment method proporsional mengakui laba kotor dan penutupan harga pokok secara seimbang mengikuti pola kas yang diterima, berdasarkan rasio laba kotor terhadap harga jual. Misalnya, jika rasio laba kotor 20%, maka setiap kas yang diterima akan mengandung 20% laba dan 80% penutupan harga pokok. Metode ini dinilai lebih mampu mencerminkan representasi ekonomi transaksi karena laba tidak ditunda

seluruhnya ke akhir periode, tetapi terdistribusi sesuai realisasi kas di tiap tahun. Literatur akuntansi hanya disinggung secukupnya di bagian ini untuk memperkuat logika bahwa pengakuan laba sebaiknya mengikuti substansi keterpulihan kas dan bukan hanya legalitas waktu penagihan.

Perusahaan yang memakai metode installment dianggap menghasilkan laporan laba-rugi yang lebih stabil dan relevandalam mencerminkan kinerja ekonomi di tiap periode. Investor dan kreditur dapat melihat bahwa laba yang diakui tumbuh seiring realisasi kas, sehingga tidak terjadi lonjakan laba ekstrem pada satu tahun tertentu sebagaimana pada metode cost recovery. Namun, metode installment tetap menuntut perusahaan untuk memastikan piutang memiliki probabilitas keterpulihan yang terukur, karena jika rasio laba diakui tetapi kas tidak masuk, perusahaan tetap akan menghadapi koreksi laba di periode mendatang (Zhaharah, 2025).

Dalam konteks pencatatan neraca, cost recovery menyebabkan saldo piutang tetap besar sampai akhir periode, namun laba kotor belum memengaruhi ekuitas. Sementara pada metode installment, piutang di neraca menurun secara bertahap mengikuti komponen harga pokok yang tertutup, sehingga nilai aset piutang lebih cepat terkoreksi sesuai realisasi kas. Dengan demikian, metode installment lebih sering dianggap memberikan representasi aset yang lebih realistis dalam neraca.

Literatur juga menyoroti aspek proper matching, di mana metode installment lebih baik dalam mencerminkan pencocokan beban-pendapatan dibanding cost recovery yang terlalu menunda laba. Walaupun demikian, cost recovery tetap relevan dalam kondisi tertentu, misalnya jika profil piutang sangat berisiko atau ketika perusahaan tidak memiliki sistem penilaian pembeli yang kuat, karena metode ini mencegah laba diakui sebelum harga pokok tertutup (Bohal, 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penjualan angsuran, meskipun secara operasional telah memenuhi unsur penyerahan barang di awal, menuntut perlakuan akuntansi yang cermat agar laporan keuangan tetap mencerminkan substansi ekonomi transaksi. Basis penjualan memberikan relevansi kinerja yang lebih cepat diakui, tetapi hanya layak digunakan ketika risiko gagal bayar rendah dan estimasi beban penagihan dapat diukur secara andal, dengan konsekuensi wajib membentuk penyisihan piutang serta cadangan beban terkait. Sementara itu, basis kas khususnya melalui installment method proporsional lebih mampu merepresentasikan realisasi laba secara bertahap sejalan dengan kas yang diterima, sekaligus mempercepat koreksi saldo piutang di neraca secara realistis. Metode cost recovery tetap relevan sebagai pendekatan sangat konservatif ketika collectibility piutang sulit dipastikan, namun cenderung menurunkan relevansi kinerja antarperiode karena menunda laba secara ekstrem. Dengan demikian, kualitas pelaporan laba dalam penjualan angsuran tidak hanya ditentukan oleh waktu pengakuan, tetapi juga oleh keterpulihan kas, pengukuran nilai piutang, serta pencadangan beban yang melekat pada transaksi.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah bahwa perusahaan perlu menempatkan pengendalian piutang sebagai fondasi awal pencatatan, karena kualitas pembeli dan kepastian arus kas angsuran akan menentukan basis serta metode pengakuan laba yang paling tepat. Penerapan installment method proporsional layak diprioritaskan ketika piutang memiliki probabilitas keterpulihan yang terukur, karena mampu menyeimbangkan kehati-hatian dan relevansi laba per periode, sekaligus menghasilkan penyajian piutang yang lebih realistis di neraca. Jika perusahaan memilih basis penjualan, pembentukan penyisihan

kerugian piutang dan cadangan beban penagihan harus dihitung dengan model estimasi yang terdokumentasi dan konsisten, bukan sekadar kebijakan nominal, agar tidak menimbulkan distorsi laba maupun aset. Selain itu, pencatatan arus kas angsuran perlu disajikan secara transparan dalam laporan arus kas dari aktivitas operasi untuk memperkuat analisis likuiditas transaksi. Perusahaan juga dianjurkan menyusun kebijakan internal terkait seleksi pembeli dan skenario koreksi laba jika terjadi gagal bayar, sehingga proses akuntansi penjualan angsuran dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial, menjaga kewajaran pelaporan laba, dan memperkuat kepercayaan pengguna laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adella, M., Dewi, N., & Ahalik, A. (2025). Analisis penerapan pengakuan pendapatan PSAK 72 dan dampaknya terhadap manajemen laba pada perusahaan konstruksi di BEI. *Journal of Management and Business Review*. <https://jnbr.ppm-school.ac.id/index.php/jnbr/article/view/247> *Jurnal Manajemen dan Bisnis*
- Asrie, I. (2025). Analisis pengakuan laba kotor terhadap penjualan angsuran pada PD. Panca Motor Singkawang, Kalimantan Barat. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/2386> *Jurnal Untan*
- Azzahrah, D. S., Yunita, K., Kurniawan, R., Rusmita, S., & Espa, V. (2025). The revenue recognition based on PSAK 72 in real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange for 2018–2021. *Buletin Poltanesa*, 26(1), 219–226. <https://e-journal.politanisamarinda.ac.id/index.php/tanesa/article/view/3328> *E-Journal Politani Samarinda*
- Bohal Marisi, D. (2025). Evaluasi penerapan ketentuan unsur pembiayaan pada pendapatan kontrak sesuai PSAK 72. *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*. <https://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/LQ/article/view/678> *ojs.itb-ad.ac.id*
- Elmi, R. P. H., & Hamidi, H. (2025). Penerapan akuntansi penjualan angsuran dan perlakuan barang yang ditarik kembali pada PT. Kaisar Motor Jaya Batam. *Equilibrium: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/equi/article/view/831> *Jurnal Unrika*
- Firmansyah, A., & Tama, S. B. (2025). Perbedaan perlakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. <https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/1392> *Jurnal Pelita Indonesia*
- Pradanti, S., & Lestari, Y. (2024). Perbedaan pengakuan pendapatan PSAK 23 dan PSAK 72 pada laporan keuangan perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (JRAK)*, 12(3), 451–468. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/75569> *Ejournal UPI*
- Saputri, A. A., & Sari, R. H. D. P. (2025). Evaluasi pengakuan pendapatan dalam PSAK 72 dan implikasinya terhadap piutang usaha di perusahaan dagang. *Jurnal Riset dan Studi Ilmiah (JRSSEM)*. <https://jrssem.publikasiindonesia.id/index.php/jrssem/article/download/179/386> *JRSSEM*
- Usman, R. R., & Akib, M. (2025). Revenue recognition for installment sales at PT Hasjrat Multifinance Kendari Branch. In *CAF Conference Proceedings*, 3, 193–202. <https://journal.uui.ac.id/inCAF/article/download/38336/17694/129792> *Portal Jurnal UII*
- Zaharah, N. A. (2025). Analysis of revenue recognition practices in trading companies on the IDX: compliance with PSAK 115. *International Journal of Trends in Accounting Research*, 6(1). <https://www.jurnal.adai.or.id/index.php/ijtar/article/view/965> *Jurnal Adai*.